

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan hak asasi manusia yang paling mengkhawatirkan adalah masalah pernikahan anak atau *child marriage*. Pernikahan anak dapat menjadi penghalang bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berdampak pada tingkat individu, keluarga, masyarakat, serta perkembangan politik negara.<sup>1</sup> Pernikahan anak atau pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Hal tersebut juga diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948 dan beberapa konvensi lainnya seperti CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*).<sup>2</sup> Sebanyak lebih dari 60% anak-anak putus sekolah dikarenakan pernikahan yang belum cukup umur.<sup>3</sup> Lebih dari 90% kehamilan remaja di negara berkembang disebabkan oleh pernikahan anak dan 50% risiko bayi meninggal dikarenakan kehamilan yang terlalu dini.<sup>4</sup> Selain itu, fakta yang lebih mengejutkan adalah lebih dari 50% anak-anak perempuan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Girls Not Bride and ICRW, *Taking Action To Address Child Marriage: The Role Of Different Sector An Overview*, diunduh dalam <https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/03/1.-Overview-Addressing-child-marriage-role-of-diff-sectors.pdf> (1/11/2017, 06:45 WIB) Hal 3

<sup>2</sup> Katie Hodgkinson, 2016, *Understanding and Addressing Child Marriage, A Scoping Study of Available Academic and Programmatic Literature for the Her Choice Alliance*, University of Amsterdam, diunduh dalam <https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/understanding-and-addressing-child-marriage-a-scoping-study-of-available-academic-and-programmatic-literature-for-the-her-choice-alliance/> (1/11/2017, 06:45 WIB)

<sup>3</sup> Girls Not Bride, *What is the impact of Child Marriage: education*, diakses dalam <https://www.girlsnotbrides.org/themes/education/> (1/11/2017, 06:45 WIB)

<sup>4</sup> Girls Not Bride, *What is the impact of Child Marriage: health*, diakses dalam <https://www.girlsnotbrides.org/themes/health/> (1/11/2017, 06:45 WIB)

suami atau pasangan mereka serta 50% pernikahan anak adalah dari keluarga miskin.<sup>5</sup>

Secara global, saat ini lebih dari 700 juta perempuan di dunia melakukan pernikahan saat mereka belum cukup umur dan setiap tahunnya lebih dari 14 juta anak perempuan menikah.<sup>6</sup> Hal ini setara dengan 10% dari jumlah populasi di dunia dan jika tidak terjadi pengurangan jumlah ini akan meningkat menjadi 1,2 miliar pada tahun 2050. Pernikahan anak terjadi di seluruh negara di dunia yang terbagi atas lintas negara, budaya, agama, dan etnis. Pada negara berkembang satu dari sembilan anak perempuan menikah pada usia 15 tahun, namun beberapa dari mereka menikah pada umur 18 tahun. Meskipun terjadi pengurangan dalam masalah pernikahan anak ini, tetapi pengurangan tersebut tidak terjadi cukup cepat dan tidak merata pada semua wilayah.<sup>7</sup> Pernikahan anak banyak terjadi di wilayah Asia Selatan. Sebagian data tersebut berasal dari jumlah pernikahan anak di wilayah regional yaitu, Asia Selatan.

Menurut data *United Nations Population Fund* (UNFPA), di Asia Selatan 46% wanita berusia 20-24 tahun menikah dan melahirkan anak sebelum umur 18 tahun dan 30% anak perempuan berusia 15-19 telah menikah. Hal ini membuat Asia Selatan menyumbang tingkat pernikahan anak tertinggi dari wilayah regional lainnya. UNFPA juga memperkirakan bahwa 130 juta anak perempuan di Asia

---

<sup>5</sup> Girls Not Bride, *What is the impact of Child Marriage: violence against girls*, diakses dalam <https://www.girlsnotbrides.org/themes/violence-against-girls/> (1/11/2017, 06:45 WIB)

<sup>6</sup> Carol Boender, 2016, *Mapping of Child Marriage Initiatives in South Asia*, UNICEF and UNFPA, diunduh dalam [https://www.unicef.org/rosa/Mapping\\_of\\_Child\\_Marriage\\_Initiatives\\_in\\_South\\_Asia.pdf](https://www.unicef.org/rosa/Mapping_of_Child_Marriage_Initiatives_in_South_Asia.pdf) (1/11/2017, 09:00 WIB)

<sup>7</sup> Heather B, 2016, *The Role Of Parliamentarians In Ending Child Marriage A Toolkit*, Girls Not Bride, diunduh dalam [https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2015/05/GNB\\_The\\_Role\\_of\\_Parliamentarians\\_2016\\_v9\\_Final.pdf](https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2015/05/GNB_The_Role_of_Parliamentarians_2016_v9_Final.pdf) (1/11/2017, 09:00 WIB) Hal 6

Selatan akan menikah pada saat mereka belum cukup umur antara tahun 2010 hingga 2030. Prevalensi pernikahan anak sangat bervariasi antara negara-negara di Asia Selatan.<sup>8</sup> Bangladesh memiliki prevalensi pernikahan anak tertinggi di wilayah ini sebanyak 66%. Bangladesh merupakan negara dengan julukan *hot spot* karenatingginya angka pernikahan anak. Bahkan masalah yang terburuk dipedesaan negara Bangladesh 70% anak melakukan pernikahan dini.<sup>9</sup> Menurut data nasional tahun 2006-2011 juga menunjukkan bahwa Bangladesh adalah negara dengan angka pernikahan tertinggi. Angka tertinggi ini berasal dari wilayah Bangladesh barat khususnya, wilayah Khulna(75%), wilayah Rajshahi (73%) dan wilayah Barisal (72%).<sup>10</sup>

Bangladesh merupakan negara yang mempunyai sistem hukum campuran yang sebagian besar adalah hukum Inggris dan hukum Islam. Sehingga undang-undang yang berlaku sering bertentangan dengan praktik hukum agama dan adat. Seperangkat hukum Bangladesh dalam menangani masalah pernikahan anak telah ada dalam *Child Marriage Restraint Act of 1929 (CMRA)*, *the Muslim Personal Law (sharia)*, *the Dissolution of Muslim Marriages Act of 1939*, dan beberapa undang-undang lainnya. Namun, hukum utama mengenai masalah pernikahan

---

<sup>8</sup>Prevalensi adalah kondisi dimana sejumlah orang dalam sebuah populasi menderita suatu penyakit atau masalah tertentu dan pada waktu tertentu. Jumlah kasus yang merupakan pembilang dari angka tersebut dan penyebutnya adalah populasi total. Baca lebih lanjut Dorland, *Dorland's Medical Equipment Word Book for Medical Transcriptionist*, 2002, United State: Suanders, hal. 39

<sup>9</sup>Tinna Khana, dkk, *Solidarity for The Children of SAARC, Child Marriage in South Asia: Realities, Responses and Way Forward*, SAARC-SEIVAC, diunduh dalam [https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/Child\\_marriage\\_paper-in-South-Asia.2013.pdf](https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/Child_marriage_paper-in-South-Asia.2013.pdf) (1/11/2017, 09:00 WIB) Hal 3

<sup>10</sup>Katie Hodgkinson, 2016, *Understanding and Addressing Child Marriage, A Scoping Study of Available Academic and Programmatic Literature for The Her Choice Alliance*, diunduh dalam <https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/understanding-and-addressing-child-marriage-a-scoping-study-of-available-academic-and-programmatic-literature-for-the-her-choice-alliance/> (1/11/2017, 09:00 WIB) Hal 13

anak adalah CMRA. Undang-undang ini mendefinisikan anak perempuan adalah dibawah usia 18 tahun dan anak laki-laki dibawah umur 21 tahun. Undang-undang ini juga mendefinisikan pernikahan anak sebagai perkawinan yang dilakukan dengan kontrak oleh salah satu pihak yang merupakan anak-anak. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan sanksi pidana bagi yang melakukan pernikahan anak.<sup>11</sup> Contohnya jika laki-laki dibawah umur 21 tahun melakukan pernikahan akan dihukum penjara selama 15 hari atau membayar denda sebesar seribu ruppe atau dengan keduanya.<sup>12</sup>

Terlepas dari undang-undang tersebut, dibawah *Special Marriage Act of 1872* dalam kasus pernikahan anak non-religius, anak perempuan yang telah mencapai usia 14 tahun dapat melakukan pernikahan atas izin orang tua. Sedangkan ordonansi hukum keluarga muslim 1961 menetapkan usia pernikahan seorang gadis pada usia 16 tahun. Ketidak adanya konsistensi undang-undang ini sering kali dalam praktiknya terjadi pernikahan dibawah umur.<sup>13</sup> Pernikahan anak di Bangladesh meningkat juga dikarenakan kelahiran yang tidak terdaftar. Tahun 2004 dan diimplementasikan pada 2006 pemerintah Bangladesh membuat sebuah persyaratan yaitu mendaftarkan akte kelahiran anak untuk memastikan bahwa ia berusia diatas 18 tahun. Namun, dalam praktiknya banyak orang tua yang membeli akte kelahiran palsu.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> IPU and WHO, 2016, *Child, early and forced marriage legislation in 37 Asia-Pacific countries*, diunduh dalam <https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/child-early-forced-marriage-legislation-37-asia-pacific-countries/> (1/11/2017, 23:00 WIB) Hal 24-26

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> Nahid Ferdousi, *Child Marriage in Bangladesh : Socio-Legal Analysis*, Journal of Sociology and Anthropology, Vol, 6, No, 1 (January 2014) , Bangladesh: Bangladesh Open University, Hal 3

<sup>14</sup> Shabina Begum, 2016, *Ending Early and Forced Marriage : Bangladesh and UK Prespective*, diunduh dalam

Tingginya angka pernikahan anak di Bangladesh disebabkan oleh faktor kemiskinan, bencana alam, kurangnya pendidikan, pelecehan, tekanan sosial, dan masalah mas kawin. Kemiskinan merupakan faktor utama dilakukannya pernikahan anak. Gadis-gadis muda di Bangladesh sering dianggap sebagai beban oleh keluarga. Selain itu, kemiskinan yang membuat anak-anak menikah sehingga mereka tidak dapat akses pendidikan dan mas kawin yang sangat rendah untuk perempuan yang lebih muda membuat pernikahan anak mudah diterima. Bangladesh merupakan negara yang mudah sekali terkena serangan bencana alam sehingga menempatkan masyarakat kedalam kemiskinan, hal ini juga membuat dilakukannya pernikahan anak untuk mencegah pelecehan seksual dari polisi-polisi. Dampaknya, banyak anak-anak di Bangladesh berhenti sekolah dan tingginya kematian perempuan dikarenakan hamil yang terlalu dini. Selain itu, dikarenakan usia antara suami dan istri yang terpaut jauh menyebabkan banyaknya kekerasan seksual terjadi di Bangladesh.<sup>15</sup>

Terkait dengan masalah pernikahan anak di Bangladesh ini, *girls not bride* sebagai organisasi internasional non-pemerintah memberikan perhatiannya terhadap Bangladesh. *Girls not bride* merupakan organisasi paling banyak dikutip oleh media.<sup>16</sup> Ia juga mendukung penuh PBB dalam *Sustainable Development*

---

<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Earlyforcedmarriage/SG/ShabinaBegum.pdf> (1/11/2017, 09:00 WIB) Hal 4

<sup>15</sup> Nurul Islam, *Child Marriage in Bangladesh*, Bureau Of Manpower Employment and Training, diunduh dalam <http://www.bmet.gov.bd/BMET/resources/Static%20PDF%20and%20DOC/publication/Brief%20on%20Child%20Marriage%20in%20Bangladesh.pdf> (1/11/2017, 11:30 WIB)

<sup>16</sup> Beata Ekert, *Girls Not Bride: The Global Partnership to End Child Marriage*, University of Oxford, diakses dalam [https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Skoll\\_Centre/Docs/Ecosystem\\_Opps/girls-not-brides-proposal.pdf](https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Skoll_Centre/Docs/Ecosystem_Opps/girls-not-brides-proposal.pdf) (1/11/2017, 11:30 WIB)



*Goals* (SDGs).<sup>17</sup> Selain itu, organisasi ini juga menjadi *top 50 list of ideas and solutions improving the lives of girls and women worldwide*.<sup>18</sup>

Namun, yang paling menarik dari organisasi ini adalah dikembangkannya sebuah teori, yaitu *theory of change* yang diciptakan oleh lebih dari 150 ilmuwan dan anggotanya untuk menyelesaikan masalah pernikahan anak. Teori ini adalah teori yang dibuat untuk memberikan informasi dan memberikan inspirasi agar lebih banyak upaya untuk mengakhiri pernikahan anak, untuk memfasilitasi kerjasama dan aliansi dengan semua pihak yang memiliki peran penting, seperti pemerintah, masyarakat sipil lokal hingga internasional, selain itu untuk dasar dalam membangun usaha atau upaya dalam menghentikan pernikahan anak.<sup>19</sup> Sehingga organisasi ini menjadi perhatian khusus peneliti dan menjadi unsur pembeda dari organisasi non-pemerintah lainnya. Disamping itu, organisasi *girls not bride* ini menjadi salah satu organisasi terbesar yang mempunyai lebih dari 20 anggota dalam menangani masalah tersebut yang bernama, *The Bangladesh Alliance to End Child Marriage* yang dibentuk tahun 2013 dengan 20 *partnership* yaitu organisasi internasional dan civil society untuk mengakhiri pernikahan anak di Bangladesh.

## 1.2 Rumusan Masalah

---

<sup>17</sup> Girls Not Bride, *Sustainable Development Goals* (SDGs), diakses dalam <https://www.girlsnotbrides.org/themes/sustainable-development-goals-sdgs/> (1/11/2017, 11:30 WIB)

<sup>18</sup> Girls not bride & Women Diliver, *Girls Not Bride Recognised On Top 50 List of Ideas and Solutions Improving The Lives of Girls and Women Worldwide*, diakses dalam <https://www.girlsnotbrides.org/girls-not-brides-recognised-on-top-50-list-of-ideas-and-solutions-improving-the-lives-of-girls-and-women-worldwide/> (1/11/2017, 11:30 WIB)

<sup>19</sup> Girl Not Bride, 2014, *A Theory of Change on Child Marriage*, diakses dalam <https://www.girlsnotbrides.org/theory-change-child-marriage-girls-brides/> (27/12/2017, 16:30 WIB)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya *Girls not bride* melalui *the Bangladesh alliance to end child marriage* dalam menangani masalah pernikahan anak (*Child Marriage*) di Bangladesh tahun 2013-2016?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- a) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya *Girls not bride* melalui *the Bangladesh alliance to end child marriage* dalam menangani masalah pernikahan anak (*child marriage*) di Bangladesh tahun 2013-2016
- b) Untuk mengetahui faktor ataupun penyebab tingginya tingkat pernikahan anak yang terjadi di Bangladesh pada budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a) Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menitik beratkan pada pengaruh organisasi global non-pemerintah yaitu, *Girls not bride* dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh, melihat latar belakang dari isu ini begitu kompleks di harapkan akademisi lain bisa mengembangkan penelitian ini dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga menciptakan analisa yang beraneka ragam dalam menjawab bagaimana pengaruh *Girls not bride* melalui *the Bangladesh alliance to end child marriage* dalam menangani masalah pernikahan anak.

- b) Manfaat Praktis

Menambah referensi dan menambah hasil riset di lingkungan Universitas tentang upaya organisasi non-pemerintah sebagai aktor *non-state*. Selain itu, terdapat manfaat bagi organisasi-organisasi non-pemerintah yang lain yang berfokus pada pernikahan anak.

#### **1.4 Penelitian Terdahulu**

Sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa akademis yang melakukan penelitian serupa berupa skripsi, thesis maupun essay. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar untuk penelitian ini. Penelitian pertama, skripsi yang ditulis oleh **Nurhayati Inayatul Maula** dengan judul **Peran *United Nation Childern's Fund* (UNICEF) dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di India Periode Tahun 2010-2012**. Pada skripsi tersebut menjelaskan kasus pernikahan anak di India dan bagaimana peran UNICEF dalam menangani kasus tersebut beserta seberapa efektif peran tersebut. Pernikahan anak di India terjadi akibat budaya kasta yang sudah ada sejak pertengahan abad. Dalam hal ini, peran UNICEF adalah dengan membuat beberapa program salah satunya yaitu, Mahilya Samakhya atau sekolah perumahan. Program ini merupakan program dengan tujuan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan di daerah-daerah pedesaan dan hasilnya, pendidikan di India meningkat dari sebelumnya.<sup>20</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah kualitatif dan disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan fenomena yang ada dan diolah dengan teori-teori dan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan

---

<sup>20</sup> Nurhayati Inayatul, *Peran United Nations Children Fund (UNICEF) dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di India Periode Tahun 2010-2012*, SKRIPSI, Jakarta : Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.



adalah organisasi internasional, pendekatan rezim, dan neofungsionalisme. Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan skripsi peneliti yaitu, pada studi kasus yang membahas tentang masalah pernikahan anak. Namun, skripsi ini juga mempunyai perbedaan dengan peneliti yaitu, pada fokus negara dan organisasi. Peneliti mengambil negara Bangladesh dan organisasi *Girls Not Bride* sedangkan skripsi yang ditulis Nurhayati ini fokus pada negara India dan organisasi UNICEF. Sehingga skripsi ini dapat menjadi acuan bagi peneliti karena studi kasus yang diambil sama dengan skripsi peneliti.

Penelitian kedua adalah jurnal yang ditulis oleh **Endah Artika dan Saiman Pakpahan** dengan judul **Peran Walk Free Foundation dalam Mengatasi Modern Slavery di Mauritania**. Mauritania merupakan negara di Afrika Barat yang mempunyai kasus *modern slavery* tertinggi di dunia, hal ini disebabkan karena tradisi yang telah ada sejak turun-temurun dan juga dikarenakan masalah kemiskinan. *Modern slavery* termasuk kedalam kejahatan kemanusiaan yang telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948. Jurnal ini juga menjelaskan peran *Walk Free Foundation* adalah dengan membuat sebuah program pencegahan dan beberapa program lainnya untuk mengatasi masalah *modern slavery* ini di Mauritania. Program pencegahan yang dilakukan adalah terjun langsung ke masyarakat dan membuat sebuah laporan serta melakukan sebuah kampanye yaitu *Global Walkfree Movement*.<sup>21</sup>

Pada jurnal ini, peneliti menggunakan pendekatan organisasi internasional dan menggunakan perspektif pluralisme yang dijelaskan dengan metode deskriptif

---

<sup>21</sup> Endah & Saiman Pakpahan, *Peran Walk Free dalam Mengatasi Modern Slavery di Mauritania*, Journal of International Society, Vol. 3, No. 2 (2016), Riau : Universitas Riau.

serta dengan menggunakan tingkat analisa perilaku kelompok organisasi. Jurnal yang ditulis oleh Endah dan Saiman ini mempunyai kesamaan dengan skripsi peneliti yaitu, pada pendekatan yang digunakan dan tingkat analisis yang digunakan. Dimana pendekatan yang digunakan adalah organisasi internasional dan tingkat analisa perilaku kelompok organisasi. Tetapi, juga terdapat perbedaan yaitu pada studi kasus meskipun pernikahan anak termasuk kedalam modern slavery. Jurnal ini sebagai acuan untuk melihat perilaku organisasi melalui pendekata organisasi internasional.

Selanjutnya, jurnal ketiga dengan judul *Gender Awareness of Rural Woman in Bangladesh* yang ditulis oleh **Shahnaj Parveen**. Jurnal ini menjelaskan bahwa secara praktik perempuan di Bangladesh selalu tertindas contohnya pernikahan dini, hak ahli waris, dan mahar. Hal tersebut disebabkan karena stigma sosial bahwa perempuan adalah beban keluarga. Pencegahan masalah ini adalah dengan *Women's empowerment* yang bergantung pada beberapa faktor yaitu, psikologis, kognitif, ekonomi, dan politik. PBB menyatakan bahwa terdapat lima dimensi pemberdayaan perempuan. Seperti, rasa harga diri perempuan, kemampuan untuk mengarahkan kehidupannya sendiri, dan mempunyai pilihan. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa untuk mengatasi hal tersebut perlu peran organisasi internasional agar pemberdayaan perempuan dapat berjalan dengan lancar.<sup>22</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Shahnaj tersebut menggunakan metode kualitatif dengan tidak meninggalkan unsur angka dan dijelaskan dengan cara deskriptif

---

<sup>22</sup> Shahnaj Parveen, *Gender Awareness of Rural Woman in Bangladesh*, Journal of International Women's Studies, Vol, 9, No, 1, (September 2007), Massachusetts : Bridgewater State University.

serta menggunakan pendekatan *women's empowerment*. Kesamaan jurnal ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menggunakan pendekatan *woman's empowerment* dan fokus pada negara yang sama yaitu, Bangladesh. Sedangkan perbedaannya, peneliti lebih berfokus pada organisasi internasional sedangkan jurnal ini berfokus pada studi kasus, kesetaraan gender. Jurnal ini sebagai acuan untuk melihat pendekatan *woman's empowerment* dalam masalah pernikahan anak di Bangladesh.

Keempat, jurnal dengan judul *The Role of NGOs in the Sustainable Development in Bangladesh* yang ditulis oleh Azizul dan Ahmed. Azizul dan Ahmed menjelaskan tentang peran organisasi non-pemerintah yaitu, *The Bangladesh Rural Advancement Committee*(BRAC) dalam pembangunan berkelanjutan di Bangladesh yang berfokus pada masalah kemiskinan. Kemiskinan di Bangladesh pada tingkat yang mengkhawatirkan. BRAC melakukan beberapa program yang berfokus pada skema kredit mikro. Program tersebut adalah *The Tenant Farmers Development Project, Adolescent Empowerment, the Micro Finance and empowering the rural economy through targeting the Extreme poverty*. Program-program ini nantinya akan menciptakan lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.<sup>23</sup>

Metode yang digunakan oleh Azizul dan Ahmed adalah kualitatif dan kuantitatif dengan dijelaskan menggunakan metode eksplanasi. Persamaan dengan skripsi peneliti terletak pada fokus negara yang diteliti yaitu, Bangladesh. Namun, perbedaannya pada studi kasus. Sehingga, jurnal ini dapat menjadi acuan untuk

---

<sup>23</sup> Azizul & Ahmed Forhad, *The Role Of NGOs in the Sustainable Development in Bangladesh*, Journal of Environment and Sustainable Development, Vol, 7, No, 2, (2013), United Kingdom : The London South Bank Univesity.

melihat kasus kemiskinan yang terjadi di Bangladesh yang juga menjadi penyebab tingginya pernikahan anak.

Penelitian ke lima merupakan jurnal yang ditulis oleh **Shahidul dan Suvi** berjudul *Women Empowerment in Bangladesh: The Rise of the Other Half*. Penelitian ini menitik beratkan pada perbandingan antara Bangladesh dan negara Asia Selatan, China, dan Vietnam untuk melihat masalah kesetaraan gender. Menggunakan pendekatan *women's empowerment* PBB, jurnal ini lebih berfokus pada pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial. Bangladesh dibandingkan dengan negara lainnya berhasil dalam hal kesetaraan gender, hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah, organisasi internasional non-pemerintah, dan pemberi bantuan dana.<sup>24</sup>

Shahidul dan Suvi menggunakan kualitatif tetapi tidak meninggalkan unsur angka untuk menjelaskan data pustaka dan menggunakan studi komparasi serta metode deskriptif. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan skripsi peneliti yaitu, pada pendekatan yang digunakan dan fokus negara yang diteliti. Namun, skripsi peneliti lebih berfokus pada Bangladesh saja dan pengaruh organisasi internasional non-pemerintah.

Penelitian yang terakhir dari peneliti sendiri dengan judul *Upaya Girls Not Bride Melalui The Bangladesh Alliance to End Child Marriage dalam Menangani Masalah Pernikahan Anak (Child Marriage) di Bangladesh Tahun 2013-2016*. Penelitian ini lebih menitik beratkan bagaimana upaya dari organisasi internasional non-pemerintah untuk menangani masalah pernikahan anak. Metode

---

<sup>24</sup> M. Shahidul & Suvi Dogra, *Women Empowerment in Bangladesh: The Rise Of the Other Half*, Journal of Development Studies, Vol, 45, No, 119, (Januari 2011), Singapore: National University of Singapore.

penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu, organisasi internasional, *women empowerment*, dan *global civil society*.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya meliputi, topik yang dibahas sama-sama tentang masalah pernikahan anak dan *women empowerment*. Metode yang digunakan juga menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Terdapat pola yang sama dengan peneliti, dimana digunakan organisasi internasional untuk menangani pemberdayaan perempuan, yaitu pemberdayaan pendidikan dan psikologi. Namun, ada juga yang berbeda yaitu, pemberdayaan ekonomi. Selain itu, perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada fokus negara masalah pernikahan anak seperti India dan Mauritania. Terdapat perbedaan juga dengan fokus organisasi internasional yang diteliti seperti UNICEF, Walk Free Foundation, dan BRAC. Penelitian ini berfokus pada organisasi non-pemerintah *girls not bride* dan fokus pada negara Bangladesh.

Tabel 1.4 Tabel Posisi Penelitian

No.	Nama Peneliti/ Judul	Metodologi/Konsep & Teori	Hasil Penelitian
1.	Nurhayati Inayatul, Peran United Nations Children Fund (UNICEF) dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di India Periode Tahun	Di analiasa secara kualitatif kemudian di sajikan secara deskriptif, dengan menggunakan pendekatan organisasi internasional, pendekatan rezim, dan	Terjadi peningkatan pendidikan di India dibuktikan dengan bertambahnya pembangunan Mahila Samkhya, Meningkatkan kesadaran

	2010-2012	neofungsionalisme	perempuan atas kesetaraan gender dibuktikan dengan pembuatan kelompok belajar, dan mengalami penurunan dalam pernikahan anak sebesar 0,27%.
2.	Endah Artika Noerilita & Saiman Pakpahan, Peran Walk Free dalam Mengatasi Modern Slavery di Mauritania	Menggunakan metode deskriptif dengan tingkat analisa perilaku kelompok organisasi.  Menggunakan pendekatan organisasi internasional dan prespektif pluralisme	Tahun 2011, Walk free foundation mengeluarkan laporan bernama <i>The Global Slavery Index</i> (GSI) untuk dijadikan alat mengevaluasi kasus <i>modern slavery</i> dan melakukan kampanye <i>Walkfree Movement</i> di seluruh dunia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global akan bahaya dari <i>modern slavery</i>
3.	Shahnaj Parveen, Gender Awareness of Rural Woman in Bangladesh	Deskriptif,  teknik analisa data  Kualitatif.  Pendekatan Women's Empowerment	Mayoritas perempuan di Bangladesh tidak menyadari ketidaksetaraan gender karena kepercayaan tradisional, rasa takut terhadap suami,



			ayah, dan anak laki-laki mereka.
4.	Azizul & Ahmed Forhad, The Role Of NGOs in the Sustainable Development in Bangladesh	Kualitatif dan kuantitatif dengan dijelaskan menggunakan metode eksplanasi.	Kegiatan dan inisiatif BRAC telah difokuskan pada pengentasan kemiskinan melalui penciptaan sumber penghasilan dan dukungan. Beberapa program telah ditemukan lebih banyak bermanfaat dan efektif
5.	M. Shahidul & Suvi Dogra, Women Empowerment in Bangladesh: The Rise Of the Other Half	Deskriptif dengan menggunakan teknik analisa data Kualitatif dan pendekatan women's empowerment serta studi komparasi	Bangladesh telah sukses memperbaiki masalah kesetaraan gender dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan pemerintah, organisasi internasional non-pemerintah.

6.	Yuenitha Rachmi, Pengaruh Girls Not Bride Melalui <i>The Bangladesh Alliance to End Child Marriage</i> dalam Menangani Masalah Pernikahan Anak ( <i>Child Marriage</i> ) di Bangladesh Tahun 2013-2016	Deskriptif , teknik analisa kualitatif, Konsep Organisasi internasional, pendekatan women's empowerment, dan <i>global civil society</i>	Penelitian berusaha untuk menjelaskan bagaimana upaya <i>Girls not bride</i> dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh.
----	--	--	---

## 1.5 Landasan Teori dan konsep

### 1.5.1 Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah aktor penting dalam hubungan internasional. Organisasi internasional merupakan institusi atau struktur dasar sosial yang ditetapkan oleh undang-undang atau tradisi mengacu pada sebuah sistem peraturan, tujuan formal, dan instrumen administratif yang dijalankan sesuai dengan teknis organisasi yang formal dan material. Organisasi internasional dibentuk untuk sebuah tujuan, visi, dan misi entah itu dalam perdagangan, militer, sosial, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Menurut Harold Jacobson organisasi internasional dibagi kedalam tiga kategori yaitu, pertama organisasi yang berfokus pada keamanan dan perdamaian. Kedua, yang berfokus pada perdagangan dan masalah ekonomi. Ketiga, berfokus pada masalah sosial dan hak asasi manusia. Organisasi internasional juga dapat diproduksi oleh kekuatan yang melintasi batas-batas nasional. Sehingga, hal tersebut dapat menciptakan jaringan kepentingan bersama dan keprihatinan yang

<sup>25</sup> Clive Archer, 2001, *International Organizations 3<sup>rd</sup> edition*, New York: Routledge, Hal 2

melampaui kepentingan dan kekhawatiran nasional. Selain itu, organisasi non-pemerintah dan organisasi intra-pemerintah mempunyai hubungan interaksi bahwa mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah lintas batas dengan menggabungkan sumber daya mereka dan melakukan kerjasama transnasional, bukan melalui usaha sepihak dari masing-masing anggota atau negara. Masyarakat dan negara juga harus bekerjasama daripada melakukan kepentingannya sendiri-sendiri.<sup>26</sup>

Organisasi internasional sangat erat kaitannya dengan pemerintahan sebuah negara. Karena organisasi internasional dapat bertindak sebagai produsen dan atau mediator sebuah gagasan kebijakan sosial dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah kesejahteraan. Selain itu, mereka juga dapat memberikan pengaruh terhadap badan politik, perusahaan, dan kelompok antar pemerintah dengan upaya mereka yaitu, mobilisasi tekanan publik melalui demonstrasi massal, melakukan lobi langsung, dan melakukan kampanye secara *online* atau *offline*.<sup>27</sup> Sehingga seringkali organisasi internasional dapat mengubah sebuah kebijakan atau mempengaruhi pembuatan kebijakan yang baru.

Organisasi internasional memiliki peranan yang dibagi kedalam tiga kategori menurut Archer. Pertama, sebagai sebuah instrumen dimana tujuan dari didirikannya organisasi internasional adalah untuk mencapai tujuan negara-negara anggotanya berdasarkan tujuan politik luar negeri negara tersebut. Kedua, sebagai arena dimana organisasi internasional merupakan tempat atau wadah bagi

---

<sup>26</sup> Akira Iriye, 2002, *Global Community, The Role of International Organization in The Making of The Contemporary World*, United State of America : University of California, Hal 2-12

<sup>27</sup> Jeff dan Martin, 2009, *Globalizing Social Justice, The Role of Nongovernmental Organizations in Bringing about Social Change*, Graet Britain: Palgrave Macmillan, Hal 9-38

berkumpulnya anggota-anggota mereka dalam membahas masalah-masalah yang sedang dihadapi dan tidak jarang organisasi internasional juga digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam wilayahnya sendiri ataupun masalah negara lainnya dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional. Ketiga adalah dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh negara.<sup>28</sup>

Organisasi internasional dibagi menjadi dua tipe yaitu, *intergovernmental organization* dan *international nongovernmental organization*. *Intergovernmental organization* adalah organisasi yang didirikan atas kerjasama yang formal dua negara atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Sedangkan *international nongovernmental organization* didirikan oleh individu-individu atau sebuah kelompok yang memiliki tujuan yang sama pula. *International nongovernmental organization* merupakan aktor *nonstate, nonprofit, nonreligious, nonmilitary association*, sehingga *nongovernmental organization* adalah organisasi yang independen tidak terikat oleh pemerintah dan unsur lainnya. Sifat dari organisasi internasional non-pemerintah yang sukarela, membuat keterbukaan mereka terhadap semua orang yang ingin bergabung tanpa membedakan identitas seperti nasionalitas, gender, agama, kelas sosial, atau kategori lainnya.<sup>29</sup> Hal ini berarti bahwa organisasi internasional non-pemerintah tidak menerima instruksi dari pemerintah, tidak menerima dukungan finansial yang substansial dari pemerintah dan tidak bekerja dalam kerjasama yang erat dengan perwakilan pemerintah. Tetapi, keduanya saling membutuhkan baik pemerintah dan organisasi

---

<sup>28</sup> Clive Archer, 1983, *International Organization*, London: George and Unwin, Hal 130-147

<sup>29</sup> Akira Iriye, 2002, *Global Community, The Role of International Organization in The Making of The Contemporary World*, United State of America : University of California, Hal 2-12

internasional non-pemerintah. Pemerintah mendapatkan dan menggunakan informasi yang diberikan oleh organisasi internasional non-pemerintah, sedangkan pemerintah merupakan jalan bagi organisasi untuk melakukan upaya mereka dalam mencapai sebuah tujuan.<sup>30</sup>

Pertumbuhan organisasi internasional non-pemerintah juga sangat difasilitasi oleh pengembangan jaringan barang, modal, dan tenaga kerja diseluruh dunia pada akhir abad kesembilan belas dan pada awal abad ke-20. Seiring semakin banyak kekayaan, perusahaan, dan individu dapat menemukan berbagai inisiatif pribadi. Organisasi non-pemerintah internasional dapat didanai oleh yayasan ini dan juga oleh donor perorangan. Tanpa adanya perkembangan ekonomi saat ini, organisasi-organisasi tersebut mungkin akan jauh lebih lambat untuk dikembangkan. Organisasi internasional non-pemerintah selalu menjadi pengaruh dan dominan dalam jaringan advokasi transnasional, karena sumber daya mereka dan akses mereka terhadap informasi. Mereka menjalankan agendanya sendiri, memperkaya arena internasional dengan jaringan transnasional. Budaya dan sosialisme internasional merupakan aktivitas yang paling banyak mereka lakukan. Karena mereka menganggap bahwa budaya dan sosial tidak mengenal batas nasional dan mereka memerlukan kerangka internasional untuk menghasilkan sebuah solusi.<sup>31</sup>

Peran penting lainnya dari organisasi non-pemerintah adalah memberikan peningkatan kesadaran melalui pendidikan bagi masyarakat, penetapan standar, dan perluasan mekanisme pengawasan serta tindak lanjut yang dibutuhkan.

---

<sup>30</sup> Peter Baehrer, 2009, *Non-Governmental Human Rights Organizations In International Relations*, United Kingdom : Palgrave Macmillan, hal 29-47

<sup>31</sup> Iriye, *Op. Cit.*, Hal. 12-29

Organisasi internasional non-pemerintah sangat mengandalkan keanggotaan dan mereka tidak menimbulkan sebuah ancaman ekonomi ataupun militer. Namun, mereka menggunakan cara diplomasi dengan menggelar pertemuan antar pemerintah seperti konferensi internasional. Sifat fleksibel organisasi non-pemerintah internasional ini dapat menciptakan ruang dimana ia dapat beroperasi. Dimulai dari bagaimana pemerintah harus bersikap dan bagaimana meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Ketika pemerintah melakukan sebuah perubahan yang baik, maka dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan organisasi non-pemerintah disebut berhasil.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penjelasan definisi organisasi internasional mengarah pada Clive Archer sedangkan untuk penjelasan mengenai upaya advokasi mengarah pada Akira Iriye. Fokus organisasi internasional pada penelitian ini mengacu pada organisasi non-pemerintah. Karena sesuai dengan penjelasan konsep diatas *girls not bride* merupakan organisasi yang independen dan tidak terikat pemerintah, dan unsur lainnya. *Girls not bride* juga merupakan organisasi yang terbuka. Sehingga pada konsep organisasi internasional ini peneliti lebih menitik beratkan pada organisasi non-pemerintah dimana sesuai dengan penjelasan diatas bahwa *girls not bride* termasuk dalam organisasi internasional non-pemerintah. Konsep organisasi internasional dalam penelitian ini berperan dalam menjelaskan bagaimana upaya advokasi yang dilakukan *girls not bride* dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh dan bertujuan untuk mengkerangkai organisasi *girls not bride*.

---

<sup>32</sup> Baehar, *Op. Cit.*, hal. 26



### **1.5.2 Women Empowerment**

Konsep pemberdayaan perempuan adalah penguatan pribadi, peningkatan kesempatan untuk hidup, dan partisipasi kolektif dalam upaya mencapai persamaan serta kesempatan untuk mendapatkan keadilan antara berbagai jenis *gender* terlebih perempuan. Hal ini merupakan proses yang berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita pembebasan dan kebebasan manusia. Peningkatan pemberdayaan dan status perempuan harus dilakukan pada semua tingkat yaitu, secara sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Pemberdayaan perempuan tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan yang dilakukan oleh lingkungan. Perjuangan perempuan untuk mendapatkan keadilan harus dikaitkan dengan sebuah gerakan perdamaian, gerakan ekologi, dan gerakan hak asasi manusia. Konsep ini juga menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan termasuk penghindaran kejahatan dan kekejaman terhadap perempuan, dengan meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan mereka dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan seperti kontribusi mereka terhadap kualitas hidup dan kemiskinan.<sup>33</sup>

Menurut Hall, pemberdayaan perempuan mempunyai beberapa karakteristik. Pertama, wanita yang dapat menentukan sikap, nilai, dan perilaku mereka dengan minat mereka sendiri. Mereka memiliki otonomi karena mereka mengklaim kebebasan dari hierarki laki-laki, entah dalam masyarakat tradisional ataupun masyarakat industri modern. Kedua, wanita yang dapat mempertahankan kesetaraan, tetapi bukan melakukan peran untuk menghadapi dominasi laki-laki. Ketiga, wanita yang dapat menggunakan bakat mereka untuk

---

<sup>33</sup> Sushama Sahay, 1998, *Women and Empowerment, Approaches and Strategies*, New Delhi: Discovery Publishing House, Hal 9-12

menjalani kehidupan yang dapat membuat mereka sukses dan wanita yang juga dapat mempertahankan kekuatannya untuk menghadapi tekanan keluarga, agama, pekerjaan, dan berkontribusi terhadap pemberdayaan semua wanita. Terakhir, wanita yang tidak meninggalkan tanggung jawab keluarga, tetapi mereka juga dapat membuat keputusan sendiri tanpa dipengaruhi otoritas laki-laki dan mereka tidak hidup melalui representatif dari laki-laki. Pemberdayaan perempuan ini membantu mereka untuk dapat melakukan peralihan yang berdampak pada struktur sosial yang lebih luas. Sehingga mereka mendapatkan keuntungan dan menghasilkan nilai baru yang memotivasi mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam konteks sosial yang lebih luas.<sup>34</sup>

Hall juga membuat beberapa generalisasi tentang pemberdayaan perempuan sebagai proses perubahan sosial. Generalisasi pertama, pemberdayaan perempuan adalah proses sosial yang menetralkan penindasan perempuan, jika mereka tidak tegas dalam mengambil sebuah tindakan maka penindasan akan terus berlanjut. Kedua, pemberdayaan perempuan identik dengan pencapaian keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Ketiga, pemberdayaan perempuan akan menghasilkan nilai-nilai tradisional perempuan yang lebih dihormati di masyarakat pada umumnya dan hal ini bukan untuk mengambil alih kekuasaan atas laki-laki. Keempat, pemberdayaan perempuan adalah dasar pembebasan dan pemberdayaan untuk semua orang. Kelima, pemberdayaan perempuan akan membawa lebih banyak keseimbangan pada hierarki-hierarki yang kurang baik pada masyarakat tradisional dan modern saat ini. Pemberdayaan menciptakan

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, Hal 13-15

kerjasama sebagai proses sosial yang layak dan membuat perkembangan semua orang menjadi lebih mungkin terjadi pada patriarki yang sangat kuat.<sup>35</sup>

Secara sederhana, Chandra menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan perempuan adalah manifestasi perumusan kekuasaan yang menentang ideologi patriarki dan dominasi laki-laki. Sehingga ini akan merujuk pada sebuah proses dan hasil, dimana hal tersebut merupakan transformasi dari intitusi yang memperkuat diskriminasi *gender*. Proses yang memungkinkan wanita mendapatkan akses dan sumber materi serta informasi. Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kesadaran untuk membangun kontribusi yang besar. Sedangkan menurut Bhasin, pemberdayaan perempuan berarti banyak hal. Pemberdayaan perempuan berarti mengenali kontribusi perempuan dan pengetahuan perempuan. Membantu mereka melawan ketakutan dan kelemahan dalam ketidak mampuan serta inferioritas. Meningkatkan harga dirinya dan martabat mereka, dengan mengendalikan tubuh mereka sendiri yang berarti perempuan mandiri. Mengurangi beban kerja berat bagi perempuan, menciptakan dan memperkuat kelompok dan organisasi perempuan.<sup>36</sup>

Berbagai aktor non-state seperti organisasi non-pemerintah yang terkait dengan pembangunan telah memulai program yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesadaran di antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah dengan memastikan partisipasi mereka yang lebih besar. Aktor non-state dalam

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Hal 25-26

<sup>36</sup> *Ibid.*, Hal 18-24

konteksini, mendukung perempuan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Aktor non-state seperti organisasi non-pemerintah memainkan peran yang penting tidak hanya dalam memobilisasi pemerintah untuk meningkatkan perhatian terhadap perempuan, tetapi meningkatkan kesadaran perempuan atas hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Aktor non-state peduli dengan hak-hak perempuan dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, membangun lembaga yang dapat mempromosikan hak-hak mereka.<sup>37</sup>

Terdapat lima tipe dari konsep pemberdayaan perempuan ini, yaitu sosial, pendidikan, ekonomi, politik, dan psikologis. Pemberdayaan sosial berfokus pada penguatan hubungan sosial perempuan dan posisi mereka dalam sebuah struktur sosial. Pemberdayaan sosial ini lebih membahas tentang diskriminasi sosial yang ada di masyarakat berdasarkan ras, agama, etnisitas, kecacatan, ataupun jenis kelamin. Dilihat dari definisi pemberdayaan perempuan sendiri juga telah mengacu pada pemberdayaan sosial, dimana proses sosial multi dimensi yang membantu seseorang mendapatkan kebebasan atas kehidupan mereka sendiri. Hal tersebut mengacu pada kekuatan seseorang yang digunakan dalam kehidupan mereka sendiri, komunitas dan masyarakat. Secara sederhana, pemberdayaan sosial berarti dapat berkontribusi di semua lapisan masyarakat. Pemberdayaan pendidikan merupakan instrumen tinggi yang bertujuan sebagai pengembangan pribadi. Pemberdayaan pendidikan dianggap menjadi satu-satunya instrumen transformasi sosial-politik dan ekonomi yang paling penting. Tanpa pendidikan

---

<sup>37</sup> Pranab Panday, 2016, *Women's Empowerment in South Asia, NGO Interventions and Agency Building in Bangladesh*, New York: Routledge, Hal 1-2

yang layak, pemberdayaan perempuan tidak mungkin dilakukan. Tipe ini berfokus bahwa perempuan perlu diberikan pendidikan dan wajib untuk membuat mereka sadar akan hak dan kewajiban mereka. Pendidikan dapat meningkatkan kesadaran sosial, politik, intelektual, budaya, dan agama.<sup>38</sup>

Pemberdayaan ekonomi merupakan alat yang ampuh untuk melawan kemiskinan, dimana perempuan mendapatkan kebebasan ekonomi mereka sendiri. Pemberdayaan ekonomi dapat digambarkan sebagai sarana dimana masyarakat miskin, tidak memiliki tanah, kehilangan, dan tertindas dari semua masyarakat dapat dibebaskan dari segala bentuk perampasan dan penindasan, dapat melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi dengan meraih keuntungan mereka sendiri. Pemberdayaan politik digambarkan bahwa partisipasi perempuan di bidang politik dan di berbagai badan pembuat keputusan merupakan alat penting untuk pemberdayaan. Kebebasan dalam bidang politik seperti bebas dalam menentukan pilihan, berbicara, dan ikut andil dalam kegiatan politik. Terakhir adalah pemberdayaan psikologi. Melalui pemberdayaan psikologis, perempuan dapat membangun rasa percaya diri mereka, mengenali harga diri mereka, dan mengendalikan pendapatan dan tubuh mereka sendiri, serta menumbuhkan kebanggaan, kedewasaan, dan ketahanan diri terhadap suatu masalah atau ancaman.<sup>39</sup>

Konsep pemberdayaan perempuan ini bertujuan untuk mengkerangkai tujuan dari upaya yang dilakukan girls not bride dalam pemberdayaan perempuan

---

<sup>38</sup> Keshab Chandra, *Concept and Types of Women Empowerment, Journal of International Forum of Teaching and Studies*, Vol, 9, No, 2, (2013), India : Vidyasagar University, Hal 19-20

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal 21-24

di Bangladesh. Girls not bride sendiri merupakan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Hadirnya organisasi ini dikarenakan masalah pernikahan anak dengan angka yang sangat tinggi di Bangladesh. Berdasarkan tipe-tipe pemberdayaan perempuan girls not bride termasuk dalam tipe pemberdayaan sosial, pendidikan, dan psikologis. Sehingga konsep ini relevan untuk menganalisa penelitian ini.

### **1.5.3 Pernikahan Anak**

Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau keduanya yang berusia dibawah 18 tahun. Definisi pernikahan anak ini sering menjadi perdebatan karena penafsiran yang berbeda pada kata anak dan pernikahan. Namun, definisi tersebut merupakan definisi secara hukum yang sering digunakan di belahan negara di dunia sehingga kuat untuk digunakan sebagai sebuah konsep. Pengertian dari definisi pernikahan anak diakui secara internasional yang tercantum pada salah satu konvensi internasional yang telah disahkan dan diratifikasi secara internasional yaitu, *Convention of the Rights of the Child*. Pada konvensi tersebut menjelaskan bahwa anak merupakan setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun. Pernikahan anak dapat dilakukan dengan berbagai konsep. Dapat dilakukan secara formal ataupun tidak formal, seperti diatur dalam hukum perdata, hukum umum, hukum agama, atau pernikahan anak hanya menjadi sebuah kebiasaan. Masalah pernikahan anak ini secara global hampir dilarang diseluruh negara di dunia. Terdapat dua kesepakatan hak asasi manusia yang paling diratifikasi oleh negara-negara yaitu, *Convention on the Rights of the Child (CRC) and the Convention on the*



*Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. Pada kesepakatan tersebut dijelaskan bahwa hak anak meliputi hak kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan perlindungan dari eksploitasi seksual serta pelecehan, dimana hal tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan ketika dilakukannya pernikahan anak. Namun, beberapa negara menginterpretasikan konvensi ini berbeda dengan pengecualian yaitu, pernikahan anak dapat dilakukannya atas izin orang tua ataupun hukum adat dan agama yang mengatur.<sup>40</sup>

Pernikahan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat membahayakan dan mengancam kesehatan, kehidupan, keselamatan, dan pendidikan masa depan mereka. Pernikahan anak juga merupakan penghalang bagi pembangunan sosial dan ekonomi, sehingga pernikahan anak adalah jalur yang merugikan selama masa pertumbuhan remaja. Selain itu, pernikahan anak dapat berdampak buruk bagi kesehatan anak perempuan ketika ia hamil dan melahirkan, membatasi anak perempuan dalam mendapatkan informasi dan membuat anak perempuan putus sekolah. Meningkatkan adanya kekerasan fisik, seksual, dan emosional. Pernikahan anak juga dapat mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat serta negara.<sup>41</sup>

Definisi pernikahan anak sering sekali dikaitkan dengan pernikahan dini ataupun pernikahan paksa. Sebenarnya pernikahan anak dan pernikahan dini

---

<sup>40</sup> UNFPA, Child Marriage- Frequently Asked Questions, Unites Nations Population Fund, diakses dalam <https://www.unfpa.org/child-marriage-frequently-asked-questions> (7/3/2018, 19:39 WIB)

<sup>41</sup> Girls Not Bride, Taking Action to Address child marriage: The role of different sector-an overview, diakses dalam <https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/03/1.-Overview-Addressing-child-marriage-role-of-diff-sectors.pdf> (7/3/2018, 19:39 WIB), hal 3

mengacu pada hal yang sama, dimana pernikahan yang dilakukan oleh satu atau kedua pasangan yang berusia dibawah 18 tahun. Tetapi pernikahan dini juga dapat digambarkan kepada pasangan yang berusia 18 tahun keatas. Pernikahan dini lebih menggambarkan kepada seseorang yang menikah lebih dari usia 18 tahun yang secara fisik atau emosional tidak dewasa, serta yang tidak dapat menentukan pilihannya sendiri disebut pernikahan dini. Sedangkan pernikahan paksa adalah pernikahan yang dilakukan ketika satu atau dua pasangan tidak memberikan persetujuan secara penuh dan bebas, tidak dapat menentukan pilihannya sendiri, dan tidak dapat mengakhiri atau meninggalkan pernikahan. Beberapa negara semua pernikahan yang melibatkan anak dianggap sebagai pernikahan paksa, tetapi ada banyak contoh anak yang dibawah usia 18 tahun menikah secara sukarela.<sup>42</sup> Sehingga definisi pernikahan anak mengacu pada pernikahan yang dilakukan oleh satu atau kedua pasangan yang berumur 18 tahun saat mereka belum siap secara fisik, mental, dan psikologis, entah secara sukarela ataupun paksa.

Beberapa konvensi dan hukum internasional yang mengatur masalah pernikahan anak menetapkan tentang masalah usia, persetujuan, kesetaraan dalam pernikahan, serta masalah hak pribadi dan hak milik perempuan. Pada pasal 16 *Universal Declaration of Human Right* tahun 1948 (UDHR) menyatakan bahwa laki-laki dan wanita usia penuh yaitu pada usia diatas 20 tahun memiliki hak untuk menikah dan berkeluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam pernikahan dan pembubarannya. Pernikahan harus dilakukan dengan persetujuan

---

<sup>42</sup> UNFPA, *Op. Cit.*,

bebas dan penuh dari pihak yang melakukan. Selain itu, adapun beberapa konvensi lain seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* tahun 1979, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1966, dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Konvensi tersebut menjelaskan bahwa harus dilakukan tindakan termasuk undang-undang yang menetapkan usia pernikahan anak, dimana usia minimum dari pernikahan adalah 18 tahun sesuai dengan rekomendasi konvensi tersebut, namun dapat dilakukan dispensasi oleh pejabat negara terkait. Hal tersebut juga ada di dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Secara garis besar konvensi ini membahas tentang diskriminasi, hak untuk mengekspresikan kemampuan anak, hak atas perlindungan, hak atas kesehatan dan pendidikan.<sup>43</sup>

#### **1.5.4 Global Civil Society**

*Global civil society* sangat erat kaitannya dengan struktur atau aktivitas kelompok masyarakat non-pemerintah. Dimana hal tersebut dapat berupa kelompok budaya yang sama, atau kelompok yang berdiri atas tujuan yang sama dengan tidak memikirkan batasan-batasan wilayah seperti geografis, terlepas dari waktu yang berbeda. Mereka dengan sengaja melakukan kegiatan sosial, bisnis, dan politik lintas batas mereka sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah dan tidak terbatas. *Global civil society* adalah sekelompok masyarakat terstruktur

---

<sup>43</sup> UNICEF, *Early Marriage: Child Spouses*, United Nations Children Fund, diakses dalam <https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf> (1/11/2017, 09:00 WIB) Hal 3

yang lebih besar dan lebih berat jika dibandingkan dengan aktor manapun.<sup>44</sup> Konsep *global civil society* hingga saat ini masih menjadi perdebatan diantara para ilmuwan. Namun, disini penulis mengambil konsep dari *Activist Prespective*. Dimana konsep ini dijelaskan oleh Mary Kaldor dalam bukunya yang berjudul *Global Civil Society: An Answer to War*, bahwa *global civil society* adalah masyarakat yang aktif untuk membangun sebuah organisasi di luar lingkaran politik yang bersifat formal dan dapat mempengaruhi kondisi tempat mereka tinggal bahkan diluar itu. *Global civil society* dapat melakukan jaringan advokasi transnasional dan membuat media internasional yang memungkinkan kampanye mereka mendapat perhatian global dengan tujuan *a global public sphere*.<sup>45</sup> Untuk lebih memahami *global civil society* kita harus memahami terlebih dahulu bentuk yang dapat memberikan pemahaman tentang apa itu *global civil society*.

Pertama, *global civil society* dapat menangani atau mengangkat isu-isu transnasional atau *global* sebagai tujuan mereka. Mereka juga memperhatikan isu-isu yang melampaui geografi teritorial. Selain itu, banyak juga *global civil society* yang mengangkat globalisasi ekonomi kontemporer dengan bertujuan untuk mengetahui produksi perusahaan transborder, perdagangan, dan keuangan. Kedua, melibatkan komunikasi lintas batas sesuai dengan namanya bahwa *global civil society* dapat melibatkan masyarakat dari satu negara dengan negara lain atau bisa disebut juga gerakan transnasional. Banyak cara yang dilakukan seperti dengan internet untuk terhubung dan berbagi informasi serta mengkoordinasi

---

<sup>44</sup> John Keane, 2003, *Global Civil Society?*, United States of America: Cambridge University Press, New York. Hal 8-11

<sup>45</sup> Mary Kaldor, 2003, *Global Civil Society : An Answer to War*, United Kingdom: Polity Press. Hal 13

berbagai macam kegiatan di seluruh dunia secara intens. Ketiga, memiliki organisasi *global*, dimana hal ini tidak lepas bahwa *global civil society* biasanya juga dapat disebut dengan NGO (*Non-Governmental Organization*) atau organisasi non pemerintah yang mempunyai struktur tersendiri dan berada di berbagai negara di dunia. Namun, beberapa *global civil society* membentuk jaringan *global* tanpa sekretariat koordinator. Terakhir, *global civil society* bekerja pada rasa solidaritas supranasional. Contohnya *global civil society* dapat membentuk identitas kolektif seperti orientasi seksual, umur, dan agama. Selain itu, *global civil society* bukanlah sebuah pasar dan perusahaan atau bagian dari perusahaan. *Global civil society* diluar lingkungan komersial.<sup>46</sup> Dimana yang dimaksud dengan penjelasan diatas adalah *global civil society* dapat berdiri karena masalah global sehingga dapat mengatasi masalah yang terdapat di negara lain. Meskipun *global civil society* tidak berada dibawah pemerintahan sebuah negara, namun seringkali *global civil society* terlibat dalam urusan pemerintahan suatu negara atau negara lain. *Global civil society* dapat menekan pemerintah dan seringkali terlibat langsung pada suatu perumusan kebijakan atau peraturan negara lain.

Konsep *global civil society* ini seringkali dikaitkan dengan konsep kosmopolitan, dimana konsep kosmopolitan tersebut mengacu pada tatanan manusia global dengan meningkatnya konektivitas tanpa melihat batas-batas negara. Kosmopolitanisme menyadari bahwa dengan adanya pembentukan asosiasi atau kelompok merupakan tanggung jawab moral secara global atau advokasi untuk menangani masalah hak asasi manusia. Selain itu juga, sebagai pelaku

---

<sup>46</sup>Jan Aart, *Global Civil Society: Changing The World?*, University of Warwick, Diakses dalam [https://www.unicef.org/spanish/socialpolicy/files/Global\\_Civil\\_Society\\_Changing\\_the\\_World.pdf](https://www.unicef.org/spanish/socialpolicy/files/Global_Civil_Society_Changing_the_World.pdf) (21/9/2017, 14.40 WIB)

global dengan keprihatinan mereka yang relevan dengan komunitas yang lebih luas. Kosmopolitanisme memfokuskan pada rasa moralitas dan kemanusiaan secara global. Bettina menjelaskan bahwa terdapat dua pandangan untuk memahami konsep ini yaitu, pertama pandangan kosmopolitanisme terhadap penetapan tanggung jawab dan kewajibannya kepada orang lain. Kedua, pemahaman tentang kosmopolitanisme sebagai identitas atau cara hidup. Pemahaman konsep ini sebagai identitas atau cara hidup adalah ketika suatu kelompok atau asosiasi melakukan tanggung jawabnya hanya untuk tujuan tertentu dan untuk mendapatkan identitas sehingga ia dikenal secara global. Sedangkan pemahaman yang pertama menjelaskan bahwa manusia kosmopolitanisme dan kelompok mempunyai tanggung jawab dan kewajibannya dalam rangka mengatasi ketidaksetaraan global yang bertujuan untuk aktivitas kemanusiaan sehingga tercipta dunia yang makmur dan sejahtera.<sup>47</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep kosmopolitanisme ini adalah konsep yang menjelaskan bahwa individu ataupun kelompok transnasional mempunyai tanggung jawab serta kewajiban untuk menyelesaikan masalah-masalah hak asasi manusia yang terjadi lintas batas negaranya. Kedua konsep diatas digunakan untuk menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang berasal dari luar untuk menyelesaikan masalah pernikahan anak di Bangladesh.

## **I.6 Metode Penelitian**

### **I.6.1 Jenis Penelitian**

---

<sup>47</sup> Bettina R, 2015, *The Cosmopolitan Potential of Exclusive Association: Criteria for Assessing the advancement of cosmopolitan norms*, United State of America: Lexington Books, Hal 21-29



Jenis penilitan yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan dekriptif, dengan menjelaskan fenomena yang terjadikemudian di kaitkan dengan konsep dan teori yang berhubungan dengan upaya organisasi internasional dalam menangani kasus pernikahan anak. Penelitian ini lebih bersifat menjelaskan berdasarkan datakemudian di kaitkan dengan kajian teori dan menuntun kepada jawaban darirumusan masalah di atas.

#### **I.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data akan bersifat telaah pustaka (library research) yaitu menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, berupa buku, jurnal, artikel, maupun majalah dan surat kabar guna memperoleh data dalam penelitian.<sup>48</sup>

#### **I.6.3 Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis menggunakan teknik analisa data yang bersifat kualitatif, yaitu analisis yang mencari dan mengumpulkan data yang kemudian diorganisir untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian tanpa mengesampingkan data yang bersifat angka dalam memenuhi substansi yang diperlukan pada penelitian.<sup>49</sup>

#### **1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian**

##### **1. Batasan Materi**

---

<sup>48</sup> Ulber Silalahi, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, hal 28

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal 39

Masalah pernikahan anak di Bangladesh membuat organisasi internasional non-pemerintah, yaitu *girls not bride* turun tangan dan melakukan berbagai upaya untuk menghentikan pernikahan anak. Namun penelitian ini hanya akan berfokus pada upaya *girls not brides* setelah dibentuknya aliansi yaitu, *the Bangladesh alliance to end child marriage*.

## 2. Batasan Waktu

Batasan waktu yang diambil dalam penulisan ini mengambil kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan 2016. Tahun 2013 digunakan sebagai awal pembahasan karena pada tahun 2013 adalah tahun dimana *Girls not bride* membuat aliansi yaitu, *the Bangladesh alliance to end child marriage*. Tahun 2016 digunakan sebagai akhir pembahasan karena pada tahun 2016 merupakan akhir dari strategi yang digunakan dalam menghentikan pernikahan anak.

### 1.7 Argumen Dasar

*Girls Not Bride* sebagai organisasi non-pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh. Organisasi ini percaya bahwa dalam menghentikan pernikahan anak dibutuhkan kerjasama yang kuat sehingga *Girls Not Bride* membentuk sebuah aliansi pada tahun 2013 yaitu, *The Bangladesh Alliance to End Child Marriage* dengan anggota 20 organisasi internasional dan *civil society*. Melalui aliansi tersebut, *Girls Not Bride* dan

anggotanya melakukan beberapa upaya secara sosial, advokasi, dan sebagainya untuk menghentikan pernikahan anak. Pada penelitian ini, konsep organisasi internasional digunakan sebagai landasan dalam mengkerangkai *girls not bride*. Sedangkan konsep *women empowerment* digunakan menjelaskan upaya *girls not bride* dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh *Girls Not Bride*, membuat pemerintah Bangladesh bertindak tegas untuk menetapkan undang-undang pernikahan anak dan telah berkomitmen untuk menghentikan pernikahan anak di negaranya. Anak-anak perempuan lebih bebas untuk mengeluarkan suara berpendapat dan mengikuti berbagai kegiatan untuk memunculkan kreativitas. Selain itu, memunculkan kesadaran diantara laki-laki di Bangladesh bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk memilih.

## 1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Konseptual 1.6 Metodologi Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Teknik Dan Alat Pengumpulan Data 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.4 Teknik Analisa Data 1.7 Argumen Dasar 1.8 Sistematika Penulisan

<b>BAB II</b>	<p style="text-align: center;"><b>Pernikahan Anak di Bangladesh</b></p> <p>2.1 Isu Pernikahan Anak di Bangladesh</p> <p>2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak di Bangladesh</p> <p>2.3 Dampak Pernikahan Anak di Bangladesh</p> <p>2.4 Kebijakan Pemerintah Bangladesh dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di Bangladesh</p> <p>2.5 Tinjauan Umum Girls Not Bride</p>
<b>BAB III</b>	<p style="text-align: center;"><b>Advokasi dan pemberdayaan pendidikan oleh Girls not bride untuk Menangani Kasus Pernikahan Anak di Bangladesh tahun 2013-2016</b></p> <p>3.1 Advokasi oleh Girls Not Bride di Bangladesh tahun 2013-2016</p> <p>3.2 Pemberdayaan Pendidikan oleh Girls Not Bride di Bangladesh tahun 2013-2016</p>
<b>BAB IV</b>	<p style="text-align: center;"><b>Girls Not Bride dalam Pemberdayaan Sosial dan Psikologis Perempuan Untuk Menangani Kasus Pernikahan Anak di Bangladesh tahun 2013-2016</b></p> <p>4.1 Pemberdayaan Sosial oleh Girls not bride di Bangladesh tahun 2013-2016</p>

	4.2 Pemberdayaan Psikologis Girls not bride  dalam menangani kasus pernikahan anak di Bangladesh
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>  5.1 Kesimpulan  5.2 Saran

